

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi akuntansi menghadapi berbagai masalah karena sepanjang musim panas yang terasa lama, koran-koran dipenuhi dengan perincian baru tentang skandal akuntansi korporasi. Pada tanggal 31 Oktober 2008- *muxonated* terjadi sebuah kasus, dimana salah seorang Direktur penjualan dari sebuah perusahaan produk elektronik tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya ketika ditanyakan mengenai adanya keanehan dalam data-data penjualan. Setelah dilakukan investigasi, ternyata mantan direktur tersebut terlibat dalam proses penjualan yang ternyata palsu. Modus pola *fraud* dilakukan dengan (www.Blogspot.com):

1. Kuitansi penjualan atas nama pembeli tertentu dibuat
2. Tagihan palsu dikeluarkan
3. Barang persediaan dikeluarkan dari gudang penyimpanan seolah-olah akan dikirimkan ke pembeli (barang tersebut kemudian dijual sendiri oleh direktur keuangan dan uangnya masuk ke kantong pribadi)
4. Penjualan dicatat dalam sistem akuntansi dan beberapa waktu kemudian dihapuskan sebagai '*non-inventory return credits*' atau *return* penjualan *non-persediaan*.

Bab I Pendahuluan

Kecurangan bukanlah hal yang baru dan sebagai akhir dari skandal ini, profesi auditing menanggapi dengan menetapkan standar-standar formal yang pertama untuk proses audit yang mengharuskan untuk dilakukannya konfirmasi piutang dan observasi atas persediaan fisik yang sekarang merupakan prosedur standar ditambah pedoman mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan. Sebagai respon atas kecurangan yang ada. Kongres menyetujui UU *Sarbanes-Oxley* pada tahun 2002 dan *AICPA* mengembangkan standar auditing yang khusus berhubungan dengan penilaian risiko kecurangan dan pendeteksiannya. Kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja (Arens *et al.*, 2006:430).

Bologna *et al.* (1993:3) mendefinisikan kecurangan “*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial. Berkaitan dengan itu *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE-2000)*, salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu (<http://id.wordpress.com/>) :

Bab I Pendahuluan

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*), Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat *financial* atau *non financial*.
2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).
3. Korupsi (*Corruption*), Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Persediaan kerap kali menjadi akun terbesar dalam neraca yang banyak perusahaan dan auditor sering merasa sulit memverifikasi eksistensi dan penilaian persediaan. Akibatnya, persediaan rentan terhadap manipulasi oleh manajer yang ingin mencapai tujuan pelaporan keuangan tertentu. Persediaan fiktif telah menjadi pusat dari beberapa kasus besar pelaporan keuangan yang curang. Banyak perusahaan memiliki persediaan yang sangat beragam dan berjumlah besar di banyak lokasi, sehingga relatif mudah bagi perusahaan untuk menambahkan persediaan fiktif pada catatan akuntansi (Arens *et al.*, 2006:454).

Bab I Pendahuluan

Walaupun auditor diharuskan memverifikasi eksistensi persediaan fisik, pengujian audit tetap dilakukan atas dasar sampel, dan biasanya tidak semua lokasi persediaan diuji. Banyak tanda peringatan atau gejala yang berpotensi menunjukkan kecurangan persediaan. Prosedur analitis sangat efektif untuk mendeteksi kecurangan persediaan. Prosedur analitis, terutama persentase marjin kotor dan perputaran persediaan seringkali membantu mendeteksi kecurangan persediaan. Persediaan fiktif akan merendahsajikan harga pokok penjualan dan melebihi persentase marjin kotor (Arens *et al.*, 2006:454).

Kecurangan terhadap persediaan dapat dicegah dan dideteksi dengan pengelolaan persediaan yang baik dan memadai, sebaiknya mencakup pengendalian persediaan yang efektif yang dapat mencegah terjadinya berbagai tindakan penyelewengan yang akan merugikan perusahaan. Dan hal ini tidak akan terlepas dari campur tangan audit internal. Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud* yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan). Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, *Statement on Internal Auditing Standards* (SIAS) No. 3, tentang *Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud* (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3

Bab I Pendahuluan

tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang *fraud* (<http://id.wordpress.com>).

PT. INTI (Perseroan Terbatas Industri Telekomunikasi Indonesia) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Pengelola Industri Telekomunikasi Strategis (BPIS) yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. PT. INTI menangani berbagai penjualan produk dan jasa untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dan sebagai perusahaan manufaktur yang menangani produksi dan penjualan jaringan telepon, PT INTI harus tetap waspada terhadap adanya kecurangan yang bisa terjadi pada persediaan yang ada pada perusahaan. Dan untuk mencegah serta mendeteksi adanya kecurangan pada persediaan, maka dibutuhkan adanya campur tangan audit internal (www.inti.co.id).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul laporan mengenai **“Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Pada Persediaan”**.

(Studi Kasus Pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia/INTI Bandung).

Bab I Pendahuluan

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi audit internal PT INTI ?
2. Bagaimana pencegahan kecurangan terhadap persediaan di PT INTI?
3. Bagaimana pendeteksian kecurangan terhadap persediaan di PT INTI?
4. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan fungsi audit internal terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada persediaan di PT INTI?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud yang diharapkan sehubungan dengan identifikasi masalah di atas adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan fungsi audit internal berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada persediaan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi audit internal di PT INTI.
2. Mengetahui cara pencegahan kecurangan terhadap persediaan di PT INTI.
3. Mengetahui cara pendeteksian kecurangan terhadap persediaan di PT INTI.

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan fungsi audit internal terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada persediaan di PT INTI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat memberikan pemahaman yang cukup baik mengenai pengaruh pelaksanaan fungsi audit internal terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada persediaan.
2. Bagi perusahaan, memberikan gambaran kepada pihak manajemen mengenai pengaruh pelaksanaan fungsi audit internal terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada persediaan dan membantu pihak manajemen dalam melakukan perbaikan sehingga pengendalian internal juga meningkat dan bisa mencegah serta mendeteksi tindakan kecurangan pada perusahaan.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian serupa yang lebih lanjut dan mendalam.